

# **PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS KEUANGAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah)**

**Hartati**

*tatisampara@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This research aims to determine and analyze the simultaneous and partial influences of educations, finances technical training, and work experiences on the quality of financial report in Central Sulawesi. The test result show that education, finance technical training, and work experiences simultaneously have significant influence on the quality of financial report in Central Sulawesi by conducting f-test with  $R^2$  of 0,670. In other words, 67% of independent variable is influenced by the independent variables; the remaining is influenced by other variables that are not included in the study. Education significantly influences the quality of financial report with t value of 0,276; financial technical training significantly influences the quality of financial report with t value of 0,166; work experience significantly influences the quality of financial report with tvalue of 0,255.*

**Keywords:** *education, finance technical training, work experience, and the quality of financial report of Governmental Institution Units in Central Sulawesi Province.*

Adanya tuntutan *good governance* adalah salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum, kini pemerintah melalui KSAP telah berhasil menyusun dan mengeluarkan suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 2005 yang selanjutnya disebut dengan PP No.24, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP, tertanggal 13 Juni 2005. Draft SAP tersebut sekarang ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Akrua yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP dengan basis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintah Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Dimana dalam PP 71 Tahun 2010 juga mengataur SAP Berbasis Kas Menuju Akrua yang dapat dilaksanakan secara bertahap, hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Dalam Opini dari BPK salah satunya yakni Dalam Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan nilai Belanja Barang dan Jasa yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang memadai serta digunakan di luar ketentuan dan menyajikan akun Aset Tetap tidak andal karena

terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak di sensus serta tidak diketahui lokasi dan luasnya. Serta diserahkan ke masyarakat tidak didukung harga perolehan dan dikuasai pihak lain dengan bukti kepemilikan ganda. Atas ketidakandalan nilai yang disajikan, penyimpangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan, dan keterbatasan dokumen dan informasi yang bisa diberikan terkait aset yang belum tercatat berpengaruh terhadap penyajian akun Aset Tetap pada Neraca. Inilah salah satu penyebab opini Wajar Dengan Pengecualian yang tidak cukup memadai, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil temuan dari BPK sehingga lahirnya fenomena yaitu dilingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini, yaitu pendidikan dan kompetensi pegawai yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan didukung dengan pengalaman kerja sehingga dapat meningkatkan pemahaman pegawai tentang SAP di SKPD-SKPD Provinsi yakni Aparatur Bagian Keuangan agar supaya dalam penyajian laporan keuangan dapat berkualitas.

Selain pendidikan, pelatihan teknis keuangan juga di lingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tengah perlu diadakan pelatihan yang memadai kepada staf bagian keuangan yang mana masih ada beberapa pegawai yang belum mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Selanjutnya pada pemahaman Penyusunan laporan Keuangan yang berkualitas berbasis Akrua di lingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tengah memang diperlukan Sumber daya manusia yakni yang mempunyai pengalaman kerja, sebab kualitas kerja bila sudah berpengalaman, maka pekerjaan yang dilakukan pastinya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada di lingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Kata pendidikan berasal dari kata *paedagogie* (Bahasa Latin) yang berarti pendidikan dan kata *pedagogia* (*paedagogiek*) yang berarti ilmu pendidikan (Nindi dalam

Purwanto 2009:7) yang berasal dari bahasa Yunani.

Menurut Soekidjo (2003 : 95) pendidikan di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.

Dalam esensi pendidikan pada konteks pengembangan organisasi, maka suatu organisasi pemerintah harus dapat mengembangkan program pendidikan yang efektif. Terdapat beberapa proses/kegiatan yang harus dilakukan dalam upaya mengembangkan program pendidikan yang efektif oleh Marihot Tua (2005:174) yakni :

1. Menganalisis kebutuhan pendidikan organisasi yang sering disebut *need analysis* atau *need assesment*.
2. Menentukan sasaran atau materi program pendidikan.
3. Menentukan metode pendidikan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan.
4. Mengevaluasi program pendidikan.

Pengertian pelatihan menurut Barry Chusway (2000:114) yaitu Pelatihan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu, serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar.

Menurut Mathis (2002) pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit dan luas.

Pelatihan teknis atau bimbingan teknis yang dimaksud disini yaitu memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/ masalah yang bersifat teknis yang mana melakukan pekerjaan yang akan lebih bertanggung jawab serta dapat membina hubungan kerja sama dan dapat membuka diri.

Ini merupakan petunjuk teknis dari Mendagri Nomor SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 yang berbunyi Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan teknis keuangan merupakan peningkatan kemampuan keahlian dalam mengelola keuangan, yang mana salah satu program yang dapat mewujudkan hal tersebut dalam hal ini profesionalisme keuangan yaitu melakukan bimbingan teknis bagi Sumber Daya Manusia sehingga dalam melakukan pekerjaannya akan lebih bertanggung jawab serta dapat membina hubungan kerja sama dan dapat membuka diri.

Adapun pelatihan teknis atau bimbingan teknis ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pemahaman pejabat dan staf di SKPD tentang akuntansi dan penatausahaan di SKPD.
- b) Memberikan keterampilan tentang teknis akuntansi keuangan, mulai dari pengidentifikasian transaksi dan penjurnalan sampai penyusunan laporan keuangan SKPD.
- c) Memberikan wawasan tentang perbedaan akuntansi dan penatausahaan serta perbedaan fungsi bendahara dan fungsi antar akuntansi.
- d) Memberikan pemahaman tentang posisi Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh SKPD dan Pemda, serta bagaimana melakukan konversi atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- e) Memberikan gambaran tentang bagaimana penyusunan petunjuk teknis untuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan oleh SKPD.

Pengertian Pengalaman Kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984).

Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Ranupandojo, 1984 dalam Harvita 2012) “Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu “ Joko, 1980 dalam Harvita 2012.

Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adalah :

1. Gerakannya mantap dan lancar setiap karyawan yang berpengalaman akan melakukan gerakan yang mantap dalam bekerja tanpa disertai keraguan.
2. Gerakannya berirama artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari
3. Lebih cepat menanggapi tanda-tanda artinya tanda-tanda seperti akan terjadi kecelakaan kerja.
4. Dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya karena didukung oleh pengalaman kerja dimilikinya maka seorang pegawai yang berpengalaman dapat menduga akan adanya kesulitan dan siap menghadapinya.
5. Bekerja dengan tenang, seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri yang cukup besar. (Asri, 1986 : 131).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

#### 1. Relevan;

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi yang ada dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, artinya informasi yang disajikan harus tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, artinya informasi yang disajikan harus selengkap mungkin, mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### 2. Andai

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur, artinya informasi yang ada menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat diverifikasi, artinya informasi yang disajikan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.
- d. Dapat dibandingkan; artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- e. Dapat dipahami; artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan signifikan Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan Pendidikan terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan Pelatihan Teknis Keuangan terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan Pengalaman Kerja terhadap Tingkat Kualitas Laporan Keuangan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah).

2. Pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah).
3. Pelatihan Teknis Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah).
4. Pengalaman Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah).

Kantor, Inspektorat, Komisi dan Satuan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel ini menurut Sugiyono (2014:85). Istilah lain ini juga disebut sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah responden 102.

Definisi operasional variabe dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## METODE

Populasi dalam penelitian ini SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 51 yang meliputi Dinas, Biro, Badan, Sekretariat,

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pendidikan (X1) Anugrah. D.N (2013)	Tingkat Pendidikan	Mengetahui tingkat pendidikan	Ordinal
	Bidang Pendidikan	Jurusan pendidikan apa yang dimiliki	
	Kualitas Pendidikan	Mengukur kualitas pendidikan	
Pelatihan (X2) Hamalik (2007)	Materi yang dibutuhkan	Materi-materi apa saja yang dibutuhkan pada saat pelatihan	Ordinal
	Metode yang digunakan	Metode yang digunakan pada saat pelatihan	
	Kemampuan instruktur pelatihan	Melihat kemampuan instruktur	
	Sasaran Pelatihan	Sarana yang digunakan pada saat pelatihan	
	Peserta Pelatihan	Kebutuhan peserta pelatihan	
	Evaluasi Pelatihan	Evaluasi setelah mengikuti pelatihan	

Pengalaman Kerja (X3) Bill Foster, (2001)	Masa Kerja	Melihat masa kerja pegawai	Ordinal
	Tingkat Pengetahuan	Mengukur tingkat pengetahuan	
	Penguasaan terhadap pekerjaan dan alat	Mengetahu penguasaan akan pekerjaan	
Kualitas Laporan Keuangan (Y) PP 71 Tahun 2010	Relevan	Memiliki manfaat umpan balik, Memiliki nilai prediksi, Tepat waktu, Lengkap	Ordinal
	Andal	Penyajian jujur, Dapatdiverifikasi, Netralitas	
	Dapat Dibandingkan	Dapat dibandingkan	
	Dapat Dipahami	Dapat dipahami	

Sumber: Data diolah, 2016

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi untuk mendapatkan data-data pendukung dalam penelitian ini. Pengujian instrumen penelitian dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka data-data penelitian yang diperoleh melalui instrumen penelitian (kuesioner) sebelum digunakan terlebih dahulu diuji keakuratan dan keandalannya sebagai alat ukur. Melalui dua bentuk pengujian untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

#### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y=Kualitas laporan keuangan

a= Intersep (Konstanta)

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> =Koefisien Regresi

X<sub>1</sub>= Pendidikan

X<sub>2</sub>=Pelatihan Teknis

X<sub>3</sub>=Pengalaman Kerja

e =Kesalahan pengganggu (*error term*)

#### 3. Pengujian Hipotesis

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 96 orang responden dengan dugaan pengaruh ketiga variabel independen (pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman kerja) terhadap

kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

<b>Dependen Variabel Y = Kualitas Laporan Keuangan</b>				
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>Standar Error</b>	<b>t</b>	<b>Sig</b>
C = Constanta	1,606	0,213	7,534	0,000
X <sub>1</sub> = Pendidikan	0,276	0,058	4,733	0,000
X <sub>2</sub> = Pelatihan Teknis	0,166	0,044	3,798	0,000
X <sub>3</sub> = Pengalaman Kerja	0,225	0,047	4,782	0,000
R-	= 0,819			
R-Square	= 0,670	F-Statistik	= 62,393	
Adjusted R-Square	= 0,660	Sig. F	= 0,000	

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 1,606 + 0,276X_1 + 0,166X_2 + 0,225X_3$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub>) memberi pengaruh terhadap variable independen ( Y ) model analisis regresi kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Untuk nilai constanta sebesar 1,606 berarti kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 1,606.
2. Pendidikan (X<sub>1</sub>) dengan koefisien regresi 0,276 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pendidikan dan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin sesuai pendidikan yang ada pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan.
3. Pelatihan teknis (X<sub>2</sub>) dengan koefisien regresi 0,166 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pelatihan teknis dan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin sesuai latihan teknis yang diikuti maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pengalaman kerja (X<sub>3</sub>) dengan koefisien regresi 0,225 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pengalaman kerja dengan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin

berpengalaman pengelola keuangan yang ada pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan.

#### **a. Pengujian Hipotesis Pertama**

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen ( X ) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen ( Y ) berarti semua variabel bebasnya, yakni pendidikan (X<sub>1</sub>), pelatihan teknis (X<sub>2</sub>), dan pengalaman kerja (X<sub>3</sub>), dengan variabel tidak bebasnya kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yakni:

Dari Tabel 4.3 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai Adjusted R-Square = 0,660 atau = 66,00%. Hal ini berarti bahwa sebesar 66,00% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.3 dari hasil perhitungan diperoleh F<sub>hitung</sub> = 62,393 pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  atau  $\alpha < 0,05$ . Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi F = 0,000. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Pendidikan, pelatihan teknis keuangan dan pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

#### **b. Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga dan Keempat**

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

##### **1. Pendidikan ( $X_1$ )**

Untuk variabel pendidikan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,276, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,000. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

##### **2. Pelatihan Teknis Keuangan ( $X_2$ )**

Untuk variabel pelatihan teknis, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,166, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,000. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pelatihan teknis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Pelatihan teknis keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi

Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

##### **3. Pengalaman Kerja ( $X_3$ )**

Untuk variabel pengalaman kerja, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,225, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,000. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa: Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

Variabel penelitian pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Propinsi Sulawesi Tengah dilakukan pembahasannya guna memperoleh gambaran hasil penelitian sebagai berikut :

#### **Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh pendidikan, pelatihan teknis keuangan dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh hasil bahwa variabel pendidikan ( $X_1$ ), pelatihan ( $X_2$ ) dan pengalaman kerja ( $X_3$ ) berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ( $Y$ ). Hal ini membuktikan bahwa jika kualitas laporan keuangan akan tercapai manakala pengelola keuangan yang terlibat didalamnya yaitu PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran yang membuat laporan keuangan sudah sesuai dengan penempatan pekerjaannya serta pendidikan, pelatihan teknis pengalaman kerja terhadap PNS dilingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tengah sangat dibutuhkan dalam



pelaksanaan pekerjaan sehari-hari didinas masing-masing.

Provinsi Sulawesi Tengah salah satu daerah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah pada tahun 2013 penyebabnya adalah pemerintah provinsi masih belum melakukan pengelolaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan dengan baik serta dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu dengan hasil penelitian yang signifikan sangat diperlukan peran dari pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan pihak legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut khususnya untuk meningkatkan peran dari bendahara dan PPK SKPD dalam proses pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk dilakukan secara lebih tertib dengan jalan memperhatikan pendidikan, pelatihan teknis keuangan yang mana amat perlu selalu dilaksanakan agar supaya informasi yang ada tidak ketinggalan dari pemerintah pusat, serta pengalaman kerja yang lama sebagai pengelola keuangan juga amat penting agar supaya pada saat pembuatan laporan keuangan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh : (1) Dwi Cahyadi (2009) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman atas laporan keuangan daerah yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di Pemerintahan terhadap variabel dependen (pemahaman atas laporan keuangan daerah) sebesar 71,5%, sedangkan sisanya 28,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan posisi di pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pemahaman atas laporan keuangan daerah kabupaten banjarnegara. (2) Mukhlisul Muzahid (2013) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Keefisien determinasi sebesar 72.0% menunjukkan bahwa tingginya pengaruh variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan, sementara pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 28% seperti komitmen organisasi dan regulasi pemerintah. Hasil tersebut menjelaskan bahwa rata-rata tingkat pendidikan pegawai pada setiap SKPD pemerintah kabupaten Aceh Utara berada pada tingkat sarjana, diploma III dan ada juga sampai magister. Selain tingkat pendidikan, kualitas pelatihan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah kabupaten Aceh Utara dimana rata-rata pegawai SKPD pernah mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan laporan keuangan 3 sampai 4 kali dalam setahun, kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja dimana rata-rata pegawai SKPD mempunyai pengalaman kerja di atas tujuh tahun namun ada juga pegawai di bawah tujuh tahun yaitu pegawai mutasi.

### **Pengaruh Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil uji regresi maka pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa bendahara dan PPK-SKPD semakin baik pendidikan maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat sehingga akan menunjang terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Relevan dengan hasil penelitian : (1) Anugraheni Dyah Nastiti (2013) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Penyajian Informasi Akuntansi ini menggambarkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka kualitas penyajian informasi akuntansi yang disajikan juga akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan seorang karyawan dengan pendidikan yang rendah. (2) Mukhlisul Muzahid (2013) tentang pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan lama pengalaman kerja pebagai terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang mana menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai SKPD Aceh khususnya yang ditempatkan dikeuangan sudah dapat menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca selain itu pegawai SKPD telah mengetahui peraturan dan ketentuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah.

Implikasi dari penelitian ini bahwa pendidikan amat perlu dimiliki oleh seorang PNS SKPD Provinsi Sulaewesi Tengah khususnya para pengelola keuangan yang mana dengan adanya pendidikan yang tinggi para PNS dapat bekerja dengan baik, mengambil keputusan serta berfikir positif serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

### **Pengaruh Pelatihan Teknis Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil uji regresi maka pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin sering mengikuti pelatihan pengelola keuangan maka ilmu yang didapatkan pada saat mengikuti diklat akan diterapkan di dinas masing-masing maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat dalam pembuatan laporan keuangannya di dinas masing-masing serta meningkatkan kinerja pengelola keuangan SKPD Propinsi Sulawesi Tengah.

Relevan dengan penelitian: (1) Mukhlisul Muzahid (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang mana pengelola keuangan SKPD daerah Aceh sering melakukan pelatihan keuangan dalam satu tahun sampai empat atau lima kali mengikuti pelatihan keuangan. (2) Cut Yunina Eriva, Islahuddin, dan Darwanis (2013) hasil dari penelitiannya menemukan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil uji regresi maka pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin lama dan tinggi pengalaman kerja seseorang PNS maka semakin berpengalaman dalam dunia kerjanya serta pekerjaan yang dihasilkan makin berkualitas khususnya pembuatan laporan keuangan di lingkup SKPD Propinsi Sulawesi Tengah.

Relevan dengan penelitian dari : (1) Mukhlisul Muzahid (2013) tentang hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang mana menggambarkan bahwa pengalaman kerja profesional memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dimana bidang pengalaman ilmu lain selain bidang keuangan/akutansi juga memiliki relevansi dan keterkaitan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. (2) Ovita Charolina, Husaini, Abdullah (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimana ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman kerja yang dimiliki pegawai maka semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan di lingkungan KPU Se- Propinsi Bengkulu.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendidikan, pelatihan teknis dan pengalaman kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pelatihan teknis berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pengalaman kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi pihak - pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil olahan data dan perhitungan secara statistik di dapatkan nilai *mean* yang terendah yaitu Variabel Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai *mean* 4,38, ini menggambarkan bahwa para pegawai di lingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan kualitasnya untuk pencapaian hasil kerja yang maksimal dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan menambahkan variabel lainnya seperti pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) dan posisi dipemerintahan sehingga menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang benar-benar menjadi unsur determinan terhadap kualitas laporan keuangan, serta menambahkan metode

penelitian dengan melakukan wawancara langsung untuk mengumpulkan data yang didapat lebih valid dan lengkap.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis akui bahwa dalam penyusunan artikel ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, SE, MSi dan Anggota Tim Pembimbing Dr. H. Mohammad Iqbal, SE, MSi, CA. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Puspita, Nindi. 2015, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan Terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Aparatur Bagian Keuangan SKPD Kabupaten Sigi, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Asri, Marwan. 1986. *Pengelolaan Karyawan*. BPFE : Yogyakarta.
- Ayuningtias, Yuliana, Harvita. 2012 Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah) <http://eprints.undip.ac.id/36161/1/AYUNINGTYAS.pdf>
- Cahyadi, Dwi. 2009, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, Dan Posisi Di Pemerintahan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Eksekutif dan Legislatif Di Kabupaten Banjarnegara). *Tesis*. Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Chusway, Barry. 2002. *Human Resource Management*. London : Kogan Page

- Manulang. 1984. *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Marihot, Tua, Efendi, Hariandja. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Mathis dan Jackson. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Mukhlisul, Muzahid. 2013 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, April 2014 : 179-196
- Nastiti, Dyah, Anugraheni. (2013) *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Kota Magelang)*  
[http://eprints.dinus.ac.id/8522/1/jurnal\\_11745.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8522/1/jurnal_11745.pdf)
- Ovita Charolina, Husaini, Abdullah. 2013, Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Se-Propinsi Bengkulu, *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 3, 2013 :82-94.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Soekidj. 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta.
- Yunina, Cut. 2013, Pengaruh pelatihan, pengalaman kerja dan standar akuntansi pemerintah terhadap sumber daya manusia di pemerintah Aceh, *Jurnal Manajemen* Volume 3 No. 2. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala